TAHUN ANGGARAN 2016 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN – PEDOMAN PELAKSANAAN
2015
PERGUB PROVINSI BANTEN NO. 75, BD.2015/NO 76, HBD. PROVINSI BANTEN: 12 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 75 TAHUN 2015 PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : -

- Bahwa dalam rangka penyeragaman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diperlukan acuan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012,. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2015.

- Peraturan Gubernur ini sebagai acuan bagi PPKD, pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara dan pejabat lainnya dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2016.

- Materi Peraturan Gubernur ini meliputi:
  1. Pendahuluan
  2. Pengelolaan Keuangan Daerah
  3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  4. Penatausahaan Keuangan Daerah
  5. Ketentuan Lainnya
  6. Penutup.

16

CATATAN : - Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Gubernur ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 28 Desember 2015.